

Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos. 26566
Telp. 0753-7465167 Fax. 0753-7465167

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.4/ /DISBUN - 2020
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2021
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan;
22. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 188.4/131 /DISBUN-PASBAR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

KEDUA

- : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamenanti
pada tanggal : 09 Juli 2020

KEPALA,

Ir. EDRIZAL

PEMBINA UTAMA MUDA / IV c

NIP. 19640218 199302 1 001

DAFTAR ISI

SK Kepala Dinas

Daftar Isi i

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan	8
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	16
2.4.	Telaahan Terhadap Rancangan RKPD	18
2.5.	Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	25

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	28
3.3.	Program dan Kegiatan	30

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 33

BAB V : PENUTUP 42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pertanian khususnya sub perkebunan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Perkebunan, Produksi

Perkebunan, Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Serta Penyuluhan Bidang Perkebunan.

Selanjutnya, Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan;
22. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.4/131/DISBUN-PASBAR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perkebunan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan bidang perkebunan yang sinkron pada Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perkebunan sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang perkebunan.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021 Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SOPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SOPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 9 (sembilan) program yang terdiri dari 23 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2019 memuat pencapaian target kinerja tahun 2019 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2019. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perkebunan tahun 2019 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2020), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perkebunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Reja Dinas Perkebunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C. 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2019

Kebupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									2					3	4
3	03	2	19		Program Peningkatan Produksi / Pertanian Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (ton):									
						1. Kelapa Sawit (ton)	2.641.044	2.877.876	2.491.044	2.881.262	116	2.561.044	2.561.044	97	
						2. Karet (Ton)	8.097	7.546	7.747	7.748	100	7.917	7.917	98	
						3. Kakao (Ton)	9.302	9.305	9.102	9.307	102	9.202	9.202	99	
						4. Nilam (Ton)	182	210	172	212	123	177	177	97	
						5. Kopi (Ton)	424	454	394	456	116	409	409	96	
						6. Aren (Ton)	196	237	182	239	131	189	189	96	
						7. Kelapa (Ton)	2.064	1.982	2.014	2.016	100	2.039	2.039	99	
3	03	2	19	16	1. Pengawasan Pengembangan Tanaman Tahunan, Rempah, Penyegar dan Semusim	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100	
				19	21	2. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Panjang Jalan Produksi	30	9	12	13	108	9	21	103
				19	51	3. Pengelolaan Lahan dan Air	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85%	85%	85%	100	85%	85%	100	
				19	03	4. Pengembangan Bibit unggul Pertanian / Perkebunan	Luas Kebun Induk yang dipelihara	14 Ha	14 Ha	14 Ha	14 Ha	100%	14 Ha	14 Ha	100
				15	08	5. Pencegahan Penanggu Langan Organisme Penganggu Tanaman perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan	300 orang	75 orang	75 orang	75 orang	100%	75 orang	225 orang	75

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renjastra Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renjastra Tahun 2018	Realisasi Renjastra Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5	6	7	8	8/7x100%	10	11	12 = (10 / 4)
			16	32	7. Statistik Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	10 dokumen	7 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	9 dokumen	90
			16	48	8. Perencanaan pembangunan Perkebunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80
3	03	2	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	22 poktan	N/A	-	-	-	11 poktan	11 Poktan	50
			25	01	1. Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan kelembagaan	22 poktan	N/A	-	-	-	11 poktan	11 Poktan	50
3	03	2	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100
			01	01	1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100
			01	02	2. Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100
			01	03	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5	6	7	8	(8/7x100%	10	11	12= (10 / 4)
3	03	2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	70%	55%	60%	60%	100	65%	65%	65%
			02	01	1. Pengadaan / pembelian gedung kantor dan rumah jabatan dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 paket	3 paket	-	-	-	1 paket	4 paket	80%
3	03	2	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
			02	01	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat	30 orang	15 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	25 rang	83%
3	03	2	17		Program Peningkatan Pemasaan hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah kerjasama pemasaan hasil produksi perkebunan	3 kerjasama	N / A	1 kerjasama	3 kerjasama	300	1 kerjasama	4 kerjasama	133%
			17	01	1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Jumah uji kualitas komoditi perkebunan dan jumlah promosi hasil perkebunan yang diikuti	1 uji kualitas dan 5 kali promosi	3 kali promosi	-	-	-	1 kali promosi	4 kali promosi	80%
			17	18	2. Pencatatan harga pasar komoditi unggulan perkebunan	Jumlah komoditi yang tersebar informasi harga pasarnya	6 komoditi	6 komoditi	6 komoditi	6 komoditi	100	6 komoditi	6 komoditi	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Program (outcomes) / Kegiatan (output)	RPJMD pada Tahun 2021	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Kegiatan Tahun Lalu 2018			dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)			
2					3	4	5	6	7	8	9 = (8/7x100%	10	11	12= (10 / 4)
3	03	2	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang terlatih	8 penyuluh	2 penyuluh	4 penyuluh	5 penyuluh	125	6 penyuluh	6 penyuluh	100%
			20	01	1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh perkebunan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100%
			20	04	2. Penyusunan programa penyuluhan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah dokumen program penyuluhan perkebunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			20	05	3. Penilaian kredit point penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah aparatur yang naik pangkat	6 orang	8 orang	-	-	-	-	8 orang	100%
			20	06	4. Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang ternilai kinerjanya	30 penyuluh	-	-	-	-	30 penyuluh	30 penyuluh	100%

Dari tabel T-C 29 dapat dilihat bahwa 3 (tiga) target program tercapai 100% dan 3 (tiga) target program lainnya pencaaiannya di atas 100%. Program-program yang targetnya tercapai 100% adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sementara itu, program-program yang pencapaian target kinerja nya diatas 100% adalah program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

Target kinerja sebanyak 15 indikator kegiatan adalah sebagai beerikut:

- Terlaksana dengan “sangat baik” atau sebesar 96% - 100 % sebanyak 14 indikator kinerja.
- Terlaksana dengan “baik” atau 80% - 95 %sebanyak 5 indikator kinerja.
- Dua indikator/kegiatan pencapaiannya di bawah 80%.

Secara umum kinerja Dinas Perkebunan menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian realisasi kinerja sebesar 96% – 100%.

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan di tahun 2019 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan tersbut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga disebabkan terjadinya kesalahan dalam penganggaran sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
3. Masalah-masalah teknis, misalnya tidak terlaksananya dengan baik pembangunan jalan produksi dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan, banyaknya bibit yang mati akibat keterlambatan dalam penanaman karena cuaca yang kurang

mendukung (akibat musim hujan), jalan ke lokasi kegiatan sulit untuk ditempuh, kurangnya tenaga teknis di lapangan, realisasi penyaluran pupuk tidak sesuai dengan rekomendasi karena rendahnya harga TBS sehingga petani tidak melakukan penebusan pupuk di kios-kios dan akibat musim kemarau dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM SKPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor perkebunan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang perkebunan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja Dinas Perkebunan tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Realisasi anggaran Dinas Perkebunan pada tahun 2016 sebesar 88,66 % dan realisasi fisik sebesar 97,30 %. Sementara pada tahun 2017 realisasi anggaran Dinas Perkebunan sebesar 85,42 % dan realisasi fisik sebesar 99,13 %. Dan realisasi anggaran pada tahun 2018 Dinas Perkebunan sebesar 80,98% dan realisasi fisik sebesar 98,67%. Realisasi anggaran belum 100% disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah dan kualitas aparatur, proses pelaksanaan APBD yang belum tepat waktu terutama penetapan APBD dan penetapan APBD perubahan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Munculnya beberapa kegiatan/program yang tidak tertampung dalam RPJMD. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah pusat yang harus diakomodir melalui APBD, misalnya, dana pendamping DAK, Dana Sharing, dan sebagainya. Selanjutnya, banyak program-program kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD justru muncul di dokumen penganggaran (RKA-SOPD dan DPA-SOPD).

- 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 3) Kurang optimalnya koordinasi antar SOPD
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Dinas Perkebunan dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pada sektor Perkebunan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: Masih belum optimalnya peningkatan produktivitas pada masing-masing komoditi unggulan perkebunan, masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi, lemahnya akses petani ke sumber modal, masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung sektor perkebunan, belum terpadunya di dalam pengelolaan pengembangan kawasan perkebunan, kapasitas SDM pelaku usaha perkebunan dan penyuluhan belum memadai, maka permasalahan dalam pembangunan perkebunan adalah:

Tabel 3.2. Isu Strategis Pembangunan Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 - 2021

Tupoksi	Permasalahan	Isu Strategis
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah. 2. Belum terwujudnya perencanaan perkebunan yang tepat waktu 3. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan dengan dokumen perencanaan perkebunan. 	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan perkebunan yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan produksi perkebunan, usaha tani,	4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan	3. Tersedianya anggaran dan pembiayaan untuk

dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan.	5. Belum optimalnya penggunaan bibit bersertifikat. 6. Masih kurangnya SDM Petani 7. Lemahnya akses petani ke sumber modal. 8. Lemahnya kelembagaan petani. 9. Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi	optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan. 4. Adanya program dan anggaran peningkatan penggunaan bibit unggul/bersertifikat. 5. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani 6. Meningkatkan keterampilan petani dalam menggunakan teknologi serta pengadaan alsintan teknologi tepat guna.
3. Pengelolaan kawasan perkebunan terpadu;	10. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan terpadu / sentra produksi perkebunan.	7. Penetapan action plan kawasan perkebunan sebagai sentra perkebunan terpadu.
4. Optimalisasi kinerja tenaga teknis perkebunan.	11. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis sektor perkebunan.	8. Peningkatan keterampilan aparatur disektor perkebunan.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Belum terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha perkebunan rakyat secara merata.
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perkebunan dan penyuluh.
- 3) Belum terbangunnya KSP Perkebunan.
- 4) Belum terbangunnya Science/ Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.
- 5) Produktifitas lahan perkebunan masih rendah.
- 6) Produktifitas tenaga kerja perkebunan masih rendah.
- 7) Nilai tukar petani masih rendah.
- 8) Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk hasil perkebunan daerah.

Untuk itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor

kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

Untuk itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi termasuk Sumber Daya, dana, sarana, dan Prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang diusulkan Dinas Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar Rp. **5.068.750.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah)**. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD: Dinas Perkebunan Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Pagu Indikatif
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan		3.149.685.000	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan		3.149.685.000
			Kelapa Sawit	2.641.044				Kelapa Sawit	2.641.044	
			Karet	8.097				Karet	8.097	
			Kakao	9.302				Kakao	9.302	
			Nilam	182				Nilam	182	
			Kopi	424				Kopi	424	
			Aren	196				Aren	196	
			Kelapa	2.064				Kelapa	2.064	
	Pengawasan Pengembangan Tanaman Tahunan, Rempah Penyegar, dan Semusim	Dinas Perkebunan	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85 %	250.000.000	Pengawasan Pengembangan Tanaman Tahunan, Rempah Penyegar, dan Semusim	Dinas Perkebunan	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85 %	250.000.000
	Perluasan Areal Kopi (Arabika dan Robusta)	Dinas Perkebunan	Luas Areal	20 Ha	250.000.000	Pengembangan Kopi	Dinas Perkebunan	Luas Areal	20 Ha	250.000.000
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan (UPTD Perbeni	Luas Kebun Induk yang	14 Ha	180.000.000	Pengembangan Bibit Unggul	UPTD Perbenihan	Luas Kebun Induk yang	14 Ha	180.000.000

	UPTD Perbenihan)	han	dipelihara			Pertanian / Perkebunan (UPTD Perbenihan)		dipelihara		
	Pembangunan Jalan Produksi	Pasaman Barat	Panjang Jalan Produksi	11 km	1.534.685.000	Pengembangan Jalan Produksi	Pasaman Barat	Panjang Jalan Produksi	11 km	1.534.685.000
	Pengelolaan Lahan Dan Air	Dinas Perkebunan	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85 %	150.000.000	Pengelolaan Lahan Dan Air	Dinas Perkebunan	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85 %	150.000.000
	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perkebunan	Jumlah Realisasi Kebutuhan Pupuk dan Pestisida	5 ton	40.000.000	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perkebunan	Jumlah Realisasi Kebutuhan Pupuk dan Pestisida	5 ton	40.000.000
	Penilaian Usaha Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Perusahaan yang di Nilai	15 Perusahaan	120.000.000	Penilaian Usaha Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Perusahaan yang di Nilai	15	120.000.000
	Pencegahan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan	75 petani	80.000.000	Pencegahan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan	75 petani	80.000.000
	Statistik Pertanian/Peternakan/Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	1 Dokumen	120.000.000	Statistik Pertanian/Peternakan/Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	1 Dokumen	120.000.000
	Perencanaan Pembangunan perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	150.000.000	Perencanaan Pembangunan perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	150.000.000
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Dinas Perkebunan	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	1 Paket	275.000.000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	1 Paket	275.000.000

						unan Tepat Guna				
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	11 Poktan	95.550.000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	11 Poktan	95.550.000
	Penguatan Kelembagaan Tani	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	11 Poktan	95.550.000	Penguatan Kelembagaan Tani	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	11 Poktan	95.550.000
3.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kerjasama Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1 Kerjasama	162.241.000	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kerjasama Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1 Kerjasama	162.241.000
	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerima Manfaat	1 kali promosi	132.241.000	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerima Manfaat	1 kali promosi	132.241.000
	Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan	Dinas Perkebunan	Jumlah Komoditi Yang Tersebar Informasi Harga Pasarnya	6 komoditi	30.000.000	Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan	Dinas Perkebunan	Jumlah Komoditi Yang Tersebar Informasi Harga Pasarnya	6 komoditi	30.000.000

	Pekan Nasional (PENAS TANI)	Dinas Perkebunan	Jumlah Penas Tani yang di Ikuti	-	-	Pekan Nasional (PENAS TANI)	Dinas Perkebunan	Jumlah Penas Tani yang di Ikuti	-	-
5.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan	Pasaman Barat	Jumlah Penyuluh yang Terlatih	1 Tahun	529.335.000	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian /Perkebunan Lapangan	Pasaman Barat	Jumlah Penyuluh yang Terlatih	1 Tahun	529.335.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh perkebunan	1 Tahun	429.335.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh perkebunan	1 Tahun	429.335.000
	Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Program Penyuluh Perkebunan	1 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Program Penyuluh Perkebunan	1 Dokumen	30.000.000
	Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Naik Pangkat	6 orang	30.000.000	Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Naik Pangkat	6 orang	30.000.000
	Melaksanakan Supervisi Penyuluh Pertanian	Dinas Perkebunan	Jumlah Penyuluh yang Ternilai Kinerjanya	30 Penyuluh	40.000.000	Melaksanakan Supervisi Penyuluh Pertanian	Dinas Perkebunan	Jumlah Penyuluh yang Ternilai Kinerjanya	30 Penyuluh	40.000.000
	Dana Operasional UPTD Perkebunan	Dinas Perkebunan	Terpenuhinya Operasional UPTD	-	-	Dana Operasional UPTD Perkebunan	Dinas Perkebunan	Terpenuhinya Operasional UPTD	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkebunan	Terpenuhinya Kebutuhan	100 %	1.043.739.000	Program Pelayanan	Dinas Perkebunan	Terpenuhinya	100 %	1.043.739.000

6.		unan	Administrasi Perkantoran			Administrasi Perkantoran		Kebutuhan Administ rasi Perkantoran		
	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perkebunan	Persentase Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur Sesuai Kebutuhan	100 %	638.739.000	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perkebunan	Persentase Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur Sesuai Kebutuhan	100 %	638.739.000
	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Dinas Perkebunan	Persentase Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur Sesuai Kebutuhan	100 %	230.000.000	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Dinas Perkebunan	Persentase Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur Sesuai Kebutuhan	100 %	230.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Perkebunan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di Ikuti	100 %	175.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Perkebunan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di Ikuti	100%	175.000.000
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kinerja Aparatur	75 %	50.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kinerja Aparatur	75 %	50.000.000
	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	Dinas Perkebunan	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	1 Paket	50.000.000	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	Dinas Perkebunan	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	1 Paket	50.000.000

	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan	Dinas Perkebunan	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	-	-	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan	Dinas Perkebunan	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	-	-
8.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Perkebunan	Terlaksananya pengadaan pakaian aparatur pemerintah	-	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Perkebunan	Terlaksananya pengadaan pakaian aparatur pemerintah	-	-
	Pengadaan Pakaian Aparatur	Dinas Perkebunan	Jumlah Pakaian Aparatur Yang Tersedia	-	-	Pengadaan Pakaian Aparatur	Dinas Perkebunan	Jumlah Pakaian Aparatur Yang Tersedia	-	-
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kualitas Kerja Aparatur	100 %	38.200.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kualitas Kerja Aparatur	100 %	38.200.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitas Sumber Dayanya	5 orang	38.200.000	Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitas Sumber Dayanya	5 orang	38.200.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	-
	Jumlah				5.068.750.000	Jumlah				5.068.750.000

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 5.068.750.000,- (**Lima milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah**) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Perkebunan dan target RPJMD Periode 2016-2021.

2.3. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi dinas perkebunan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dinas perkebunan menjadi salah satu instansi teknis strategis pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka usulan program dari masyarakat menjadi salah satu program utama dinas perkebunan yang diakomodir melalui kegiatan musrenbang dan juga isu-isu penting yang berkembang dari masyarakat.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Berdasarkan Hasil Musrenbang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kegiatan Disetujui	Readiness Criteria/ Data Dukung	Keterangan	Jumlah Kegiatan Ditolak	Keterangan
1	Koto Balingka	9	-	1. Lengkapi proposal. 2. Lengkapi Nana Kelompok Tani	-	
2	Ranah Batahan	-	-	-	1	Tidak kewenangan
3	Sungai Aur	1	Kelompok Tani Pemuda Peduli Sikilang	Lengkapi Proposal, Pembebasan Lahan, dll	-	-
4	Kinali	12	-	Lengkapi Proposal, lengkapi nama kelompok tani	6	Tidak tersedia anggaran pada APBD, Tidak kewenangan
5	Gunuang Tuleh	7	-	Lengkapi nama kelompok tani dan lengkapi proposal	1	Tidak kewenangan
6	Sungai Beremas	1	-	Lengkapi Proposal	2	Tidak tersedia pada anggaran APBD
7	Talamau	4	-	Lengkapi nama kelompok tani, lengkapi proposal	3	Tidak kewenangan, tidak tersedia pada anggaran APBD, Diajukan melalui dana APBN
8	Lembah Melintang	1	-	Lengkapi Nama Kelompok Tani, Lengkapi Proposal	4	Tidak tersedia pada anggaran APBD
9	Pasaman	1	-	-	1	Tidak kewenangan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode tahun 2015 – 2019 mempunyai visi sebagai berikut “ Menjadi Direktorat Jenderal yang Profesional dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan secara Optimal, Berdaya Saing dan Bernilai Tambah Tinggi untuk Kesejahteraan Pekebun dan Memperkokoh Fondasi Sistem Pertanian Bio-Industry Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan integrasi antara pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan.
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
5. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan.
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan.
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan

Sasaran utama pembangunan perkebunan yang meliputi sasaran mikro (produksi, luas tanaman menghasilkan/TM dan produktivitas) diproyeksikan sedemikian rupa sehingga selaras dalam mendukung pencapaian 6 sasaran strategis kementerian pertanian.

Penetapan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan ditingkat Nasional dan Daerah yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam pembangunan perkebunan.

Beberapa program dan kegiatan yang ada pada Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan perluasan tanaman kopi robusta, perluasan tanaman kopi arabika, intensifikasi tanaman kopi robusta, intensifikasi tanaman kopi arabika, peremajaan tanaman kopi robusta dan arabika, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman kopi, peremajaan tanaman kakao, perluasan dan peremajaan tanaman kelapa dan lain-lain.
2. Program Dukungan perlindungan perkebunan dengan kegiatan antara lain penerapan pengendalian hama terpadu OPT kakao dan kopi
3. Program pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan kegiatan antara lain pembangunan embung pertanian.
4. Program penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan antara lain penumbuhan dan pengembangan korporasi petani karet, kopi, kelapa sawit, pala dan karet.
5. Program pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan kegiatan antara lain pengembangan tanaman cengkeh, pengembangan tanaman nilam dan lain-lain.
6. Program dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan kegiatan antara lain penyediaan alat pasca panen tanaman kopi, kakao, nilam, kelapa dan lain-lain.

Beberapa program dan kegiatan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Program pengolahan dan pemasaran hasil dengan kegiatan antara lain penetapan harga dan pengawalan stabilitas harga TBS, pengembangan unit pengolahan hasil komoditi perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan antara lain penggunaan alat mesin pertanian dan pasca panen, penerapan mutu fermentasi kakao dan sebagainya.
3. Pengembangan kawasan sentra produksi dan agrobisnis dengan kegiatan antara lain peningkatan penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat, pengembangan dan perluasan tanaman kopi rakyat, pengembangan nagari model kakao, kopi dan kelapa.
4. Peningkatan produksi dan produktifitas dengan kegiatan antara lain penyediaan sarana brigade dan pengendalian serangan OPT, gerakan perlindungan tanaman, pengembangan tanaman kakao berkelanjutan, gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan, pengawasan peredaran benih unggul perkebunan, serifikasi dan pengujian benih unggul perkebunan, revitalisasi lahan kebun rakyat, gerakan pemangkasan dan pemupukan kakao dan lain sebagainya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2022, Dinas Perkebunan berperan dalam mendukung pencapaian target misi 3 dan sasaran 2 dengan turunan tujuan untuk Dinas Perkebunan adalah Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan. Tujuan dari Dinas Perkebunan ini kemudian diuraikan ke dalam sasaran dan target kinerja sasaran per tahun yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan, tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan jangka menengah disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Perkebunan Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target kinerja sasaran pada tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan	1. Meningkatnya produksi perkebunan	Jumlah produksi komoditi perkebunan:	Ton						
				1. Kelapa Sawit		2.381.044	2.431.044	2.491.044	2.561.044	2.641.044	2.721.044
				2. Karet		7.437	7.587	7.747	7.917	8.097	8.277
				3. Kakao		8.902	9.002	9.102	9.202	9.302	9.402
				4. Nilam		164	167	172	177	182	188
				5. Kopi		367	379	394	409	424	439
				6. Aren		171	176	182	189	196	204
				7. Kelapa Dalam		1.979	1.994	2.014	2.039	2.064	2.089
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1. Nilai SAKIP	NA	NA	NA	B	B	B	B
				2. Level Maturitas SPIP	NA	NA	NA	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				3. Opini terhadap laporan keuangan	NA	NA	NA	NA	WTP	WTP	WTP

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, program-program yang direncanakan Dinas Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Secara umum rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 tertuang dalam 9 (sembilan) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi, Peraturan Perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Pengguna Sarana Pertanian
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman
- 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan Sarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya
 - b. Pengembangan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian
 7. Program Penyuluh Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian
 8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
 - a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Karena keterbatasan anggaran yang tersedia maka dari 9 prgram dengan 17 kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain kegiatan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan

3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229,872,000	280,000,000
---	----	----	------	--	------------------------------------	-------------	-------------

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		45,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	75,000,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Disbun yang dibutuhkan		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	1 Paket		14,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	30,000,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	175,000,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000			20,000,000		
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	2 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	20,000,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,623,000			132,954,150		
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	12 Bulan		88,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	92,610,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	2 THL 1 Paket		38,423,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	40,344,150
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102,981,000			190,681,000		
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	3 Unit 2 THL		53,981,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	33,981,000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	41 Unit		34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	56,700,000

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	69 Unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								180,000,000				350,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								60,000,000				150,000,000	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton): Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Aren, Nilam, dan Kelapa Dalam	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Tersedianya fasilitas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21048 Ton	4 THL 12 Bulan		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton): Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Aren, Nilam, dan Kelapa Dalam	21048 Ton	150,000,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								120,000,000				200,000,000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton): Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Aren, Nilam, dan Kelapa Dalam	Luas kebun sumber daya genetik tanaman		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	21048 Ton	14 Ha		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton): Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Aren, Nilam, dan Kelapa Dalam	21048 Ton	200,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								656,658,174				1,750,000,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								55,000,000				150,000,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian		Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	21048 Ton	12 Bulan		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton)	21048 Ton	150,000,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								601,658,174				1,600,000,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton)	Panjang jalan produksi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21048 Ton	2 Km		601,658,174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton)	21048 Ton	1,600,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								70,000,000				200,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								70,000,000				200,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton)	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21048 Ton	75 Orang		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan (ton)	21048 Ton	200,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								342,865,000				750,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								342,865,000				750,000,000	

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Terlatih	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas kapasitas kelembagaan penyuluh Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	22 Penyuluh 5 Peyuluh		283,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh Terlatih	10 Orang	600,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Terlatih	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan petani		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	11 Poktan 2 THL		59,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh Terlatih	10 Orang	150,000,000
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							40,000,000			60,000,000			
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							40,000,000			60,000,000			
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							40,000,000			60,000,000			
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama Pemasaran hasil Pertanian/perkebunan	Jumlah komoditi yang tersebar informasi harga pasarnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 MoU	6 Komoditi		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kerjasama Pemasaran hasil Pertanian/perkebunan	1 MoU	60,000,000
TOTAL													6,443,150,720			9,118,366,765		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2021. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dimulai dari pengelolaan perkebunan sektor hulu (on farm) dan memperkuat sektor hilir (off farm) guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan di tingkat nasional maupun global, dengan partisipasi penuh dari masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, 09 Juli 2020
Kepala,

Ir. EDRIZAL

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640218 199302 1 001